

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

KOTA KENDARI

STRATEGIS 2021-2025



TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

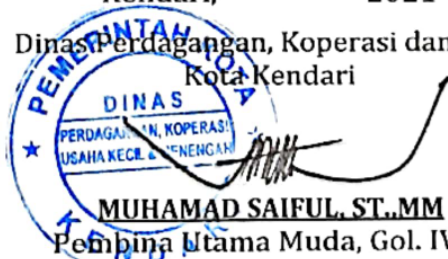
Puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah SWT, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari Tahun 2022. Rancangan akhir Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk Periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Rancangan akhir Rencana Kerja ini merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah, yang mana proses dalam penyusunan rencana kerja ini berdasarkan kebutuhan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang pada Renstra perangkat daerah. Mendukung melaksanakan arah kebijakan dan strategi perangkat daerah yang menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dituangkan melalui program dan kegiatan mewujudkan tujuan akhir dari proses pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari dalam mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik PD tahun 2022.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan terhadap penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari Tahun 2022. Dalam rangka mencapai kesempurnaan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini, kami membuka pintu untuk menerima saran dan masukan menuju arah yang lebih baik.

Kendari, 2021

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kota Kendari



MUHAMAD SAIFUL ST.MM
Pembina Utama Muda, Gol. IV/a
NIP. 19680708 199703 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB. II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	10
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN	18
3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	27
3.2. Program dan Kegiatan	31
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
BAB. V PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2022 Kota Kendari
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Kendari
Tabel 3.1	Telaah Renstra Kementrian Koperasi dan UKM
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program Renstra Perangkat Daerah
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Kendari Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Disamping itu Rencana Kerja Perangkat Daerah juga sebagai tolak ukur dalam pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sampai dengan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Yang di maksud berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah adalah dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan yang dimaksud berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan adalah bertujuan untuk

memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, dan disampaikan ke Bappeda untuk diverifikasi dan memastikan kesesuaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan rancangan akhir RKPD. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan turunan dari Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi pedoman penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi juga dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir RKPD menjadi rancangan RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD yang telah ditetapkan melalui Pemerintah Provinsi menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS), RAPBD dan APBD Kabupaten/Kota.

1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Unit Metrologi Legal;
24. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah yang Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025;
28. Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 2010 – 2030;
30. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 tahun 2012 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari tahun 2012 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah kota Kendari no 1 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari tahun 2005 – 2025;
32. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari;
33. Peraturan Walikota Kendari No. 51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Kendari;
34. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari tahun 2017-2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari adalah:

1. Sebagai pedoman penyusunan rancangan rencana kerja tahun 2022;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022;
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2022;
4. Evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari tahun lalu; dan
5. Evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari tahun berjalan.

Adapun tujuan dari Penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari adalah;

1. Terlaksananya rencana kerja pembangunan daerah Kota Kendari;
2. Tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari;
3. Terlaksananya program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari di tahun 2022;
4. Tercapainya sasaran dan target program kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari Tahun 2017-2022. Pelaksanaan rencana kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari haruslah memperhatikan capaian rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan yang mengacu pada APBD tahun berjalan dan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya. Pencapaian rencana kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari juga harus memperhatikan sasaran dan target program kegiatan yang telah disusun dalam Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat tercapai.

Review hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari tahun lalu, dan realisasi Renstra Badan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari. Laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah memuat sasaran strategis dan indikator sasaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari dengan melakukan pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja. Laporan kinerja ini juga merupakan wujud akuntabilitas dan pertanggung jawaban kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Berhasil atau tidaknya rencana kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari dapat dilihat dari pencapaian hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu. Berikut ini disajikan Evaluasi hasil Pelaksanaan rencana kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari tahun 2022(terlampir).

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021
KOTA KENDARI

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021 (Tahun n-1)	Tingkat Pencapaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8 (7/6)	9	10 (7+9)	11 =(10/4)
3	Urusan Pemerintahan Pilihan								
3 30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan								
3 30 02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Cakupan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	90 %	90 %	100 %	100 %	90 %	90 %	100 %
3 30 02 2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Perusahaan	Meningkatnya Pemahaman Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minol & Terkendalinya Peredaran Minol	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3 30 02 2.05 01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	Meningkatnya Pemahaman Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minol & Terkendalinya Peredaran Minol					69 Usaha	50 Usaha	
3 30 03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Tingkat Perlindungan Konsumen	90 %	90 %	100 %	100 %	90 %	90 %	100 %
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Pasar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Biaya Relensi dan MC					5 Paket	4 Paket	
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Biaya Operasional Pasar					12 Bulan	11 Bulan	

3	30	04				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	90	%	90	%	100%	90	%	100%	100%
3	30	04	2.01			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100	%	100	%	100%	100	%	100%	100%
3	30	04	2.01	03		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Barang Pokok dan Barang Penting						6	Bulan		
3	30	06				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya pengawasan terhadap penggunaan alat UTTP	90	%	90	%	100%	90	%	100%	100%
3	30	06	2.01			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya Kesadaran Pemahaman Masyarakat tentang Perlindungan Hak-Hak Konsumen, Pengujian / penilaian terhadap alat ukur untuk dibandingkan dengan standar sesuai dengan satuan ukur yang berlaku dan dilakukan oleh tenaga ahli atau berhak	100	%	100	%	100%	100	%	100%	100%
3	30	06	2.01	01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Terlaksananya Kegiatan Tera Tera Ulang						520	Alat Ukur	672	Alat Ukur
3	30	06	2.01	02		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Terlaksananya Pengawasan							- Alat Ukur		
3	30	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	100	%	100%	100	%	100%	100%
3	30	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan	100	%	100	%	100%	100	%	100%	100%
3	30	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah						1	Dokumen	1	Dokumen
3	30	01	2.01	06		Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen SAKIP						1	Dokumen	1	Dokumen

3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Keg. Administrasi Keuangan dan Administrasi Perkantoran	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji, Tunjangan ASN, TP-PNS & Insentif						14	Bulan	14	Bulan	
3	30	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Dokumen SPJ Keuangan						12	Dokumen	18	Dokumen	
3	30	01	2.02	07	Kordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan						4	Dokumen	4	Dokumen	
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Sarana Administrasi Perkantoran	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						12	Bulan	12	Bulan	
3	30	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat-alat Kebersihan						12	Bulan	12	Bulan	
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK						12	Bulan	12	Bulan	
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Biaya Cetak dan Penggandaan						12	Bulan	12	Bulan	
3	30	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Biaya Makanan dan Minuman Pegawai, Tamu						12	Bulan	12	Bulan	
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat-rapat Koordinasi dan biaya perjalanan Dinas						12	Bulan	12	Bulan	
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya						3	Unit	3	Unit	
3	30	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1	Paket	1	Paket	
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Sarana Administrasi Perkantoran	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Belanja Kebutuhan Materi						12	Bulan	12	Bulan	

3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik						12	Bulan		
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi Sarana Administrasi Perkantoran	100	%	100	%	100	100	%	100%	
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Oli, BBM, Suku Cadang dan Biaya STNK					14	Unit	Unit		
3	30	01	2.09	010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Biaya Service AC, Komputer, Laptop dan Printer					12	Bulan	Bulan		
2	17	03			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi & Kelenbagaan yang pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkooperasi	90	%	90	%	100	90	%	100%	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Koperasi yang legal dan sehat	100	%	100	%	100	100	%	100%	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelengkapan serta akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten Kota	Terlaksananya Pengawasan Koperasi					50	Koperasi	90	Koperasi	
2	17	04			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Sertifikat Yang diterbitkan dari hasil penilaian Kesehatan	90	%	-	%	0	90	%	100%	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi	100	%	100	%	100	100	%	100%	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Koperasi yang sehat					-	Orang	-	Orang	
2	17	05			Program Pendidikan dan Latihan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	90	%	90	%	100	90	%	100%	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkooperasi Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman Pengurus Tentang Koperasi	100	%	100	%	100	100	%	100%	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkooperasi serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan SDM Koperasi					75	Orang	75	Orang	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari dan Peraturan Walikota Kendari Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup Dinas;
- b. Perencanaan, pengembangan dan pengawasan bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan usaha di bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. Pelaksanaan pembinaan perizinan dan tanda daftar serta pelaksanaan pelayanan umum;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dan tenaga fungsional lingkup Dinas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KOTA KENDARI

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Realisasi Perdagangan Antar Pulau			1,901.667.502.83	1.939.700.852.89	1.978.494.869.95	-	1,132.609,126.00	1,234.543,947.30	-	-	-
2	Persentase Nilai Tindak Lanjut MOU Bidang Perdagangan			1 MOU	1 MOU	1 MOU	-	3 MOU	- MOU	-	-	-
3	Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Mikro Sektor Barang dan Jasa			0.5%	0.5%	2.5%	-	0.50%	0.98%	-	-	-
4	Persentase Koperasi Aktif			74%	75%	75%	73%	74%	44.7%	73%	73%	-
5	Persentase Cakupan Pengawasan Distribusi Perdagangan			-	-	-	70%	-	-	70%	75%	-
6	Persentase Pelayanan Tera dan Tera Ulang serta Pengawasan			-	-	-	75%	-	-	75%	76%	-
7	Cakupan Bina Usaha Mikro			-	-	-	0.6%	-	-	0.6%	0.7%	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pembinaan dan administrasi pelayanan kepegawaian, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan telaahan rencana strategis dari kementerian atau Lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari.

Isu-isu strategis pembangunan di Kota Kendari yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari adalah:

a. Permasalahan Internal

- 1) Pertumbuhan jumlah usaha indagkop dan UMKM tidak diimbangi secara kualitas kemampuan pengelolaan usaha. Dampak dari hal tersebut adalah rendahnya tingkat produktifitas usaha serta lambannya pengembangan usaha.
- 2) Sumber Daya Manusia aparat Pembina sektor perdagangan, koperasi dan UMKM berdasarkan spesifikasi profesi/keahlian sektor masing-masing masih sangat terbatas baik secara kuantitas maupun secara kualitas.
- 3) Alokasi anggaran pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM masih sangat terbatas sedangkan dinas membidangi 4 (empat) sektor ekonomi; Perdagangan, Kemetrollogian, Koperasi dan UMKM.
- 4) Prasarana dan sarana penunjang pelayanan masih sangat terbatas sehingga daya jangkau dan kualitas pelayanan juga masih belum maksimal.

b. Permasalahan Eksternal

I. Sektor Perdagangan

- (1) Barang kebutuhan pokok dan barang strategis pada umumnya masih didatangkan dari luar daerah sehingga rentan terhadap fluktuasi harga.
- (2) Biaya disitribusi barang masih tinggi sehingga harga yang dibayar konsumen juga tinggi Mata rantai distribusi barang panjang menyebabkan biaya ekonomi tinggi.
- (3) Sarana prasarana distribusi barang seperti kapal, pelabuhan, gudang, pasar belum dapat mengimbangi pertumbuhan permintaan masyarakat konsumen.
- (4) Manajemen usaha sektor perdagangan seperti pedagang pengecer, grosir, dan sector informal/PKL belum memadai dan tidak mengikuti perkembangan dinamika usaha.
- (5) Perlindungan konsumen pengamanan barang yang merugikan konsumen belum maksimal.
- (6) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat belum berkembang.
- (7) Pangsa pasar produk lokal daerah (regional, Nasional dan ekspor) masih rendah.

II. Sektor Koperasi dan UMKM

- (1) Pada umumnya usaha Koperasi serta Usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) sulit berkembang karena tidak mencapai skala ekonomi.
- (2) Kelembagaan usaha KUMKM masih lemah karena pemahaman dan kemampuan SDM pengurus / pengusaha masih sangat rendah.
- (3) Kapasitas dan kualitas pengelola koperasi masih sangat rendah.
- (4) Pembentukan usaha koperasi masih didasarkan untuk mendapat bantuan/fasilitas pemerintah belum mengarah pada kekuatan dan prospek ekonomi.
- (5) Terbatasnya akses KUMKM terhadap sumber daya produktif (bahan baku, permodalan, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar)
- (6) Rendahnya produktifitas dan daya saing produk KUMKM.
- (7) Akses permodalan terbatas karena tingkat suku bunga tinggi dan persyaratan administrasi dan anggaran masih sulit dipenuhi Koperasi dan UMKM.

Dalam konteks Rencana Strategis (RENSTRA) maka Visi dan misi adalah merupakan gambaran apa yang ingin dicapai Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari pada akhir periode, yaitu : Visi Kota Kendari yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun ke depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

“MEWUJUDKAN KOTA KENDARI KOTA LAYAK HUNI YANG BERBASIS EKOLOGI, INFORMASIDAN TEKNOLOGI”

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Kendari tersebut maka selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

Misi 1 dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mencerdaskan masyarakat sehingga mempunyai kualifikasi sebagai manusia yang berkualitas dan dapat mengaktualisasikan dirinya di masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar bagi kelompok rentan dan memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan berusaha serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, menciptakan situasi dan kondisi yang

memberikan rasa aman, tentram dan kondusif untuk melaksanakan aktivitas keseharian bagi warga kota melalui peningkatan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, melakukan upaya menanamkan dan mempertahankan kesenian dan nilai-nilai budaya lokal serta nilai-nilai kepahlawanan yang berfalsafah Pancasila kepada warga kota utamanya generasi muda, melakukan upaya integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan terminal) melalui implementasi manajemen logistik kota.

Penggalian potensi, peningkatan investasi, serta pengembangan dan penerapan konsep logistic yang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional, melakukan upaya mendorong usaha-usaha ekonomi lokal untuk mampu berinovasi dan mengembangkan industri kreatif agar bisa bersaing di pasar global serta dengan penggunaan sistem informasi melalui perangkat canggih TI (teknologi informasi). Target tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi yang dilakukan untuk mendukung tujuan dan sasaran organisasi adalah:

1. Membangun dan mengembangkan simpul Pusat Kegiatan Logistik Kota baik dalam Skala Pelayanan Lokal, Regional dan Nasional;
2. Memberikan Perlindungan kepada Konsumen serta menjamin keamanan perdagangan;
3. Meningkatkan Realisasi Kerjasama Bidang Perdagangan atas MoU yang telah disepakati antar pemerintah Kota Kendari dengan pihak yang bekerjasama;

Sedangkan kebijakan yang diambil guna mendukung strategi tersebut adalah:

- Strategi 1 : Membangun dan mengembangkan simpul Pusat Kegiatan Logistik Kota baik dalam Skala Pelayanan Lokal, Regional dan Nasional.
- Meningkatkan akses/sarana dan prasarana pendukung menuju simpul kegiatan logistik dan distribusi dalam kota;
 - Pengembangan sistem informasi dan manajemen rantai pasok (supply chain management);

Strategi 2 : Memberikan Perlindungan kepada Konsumen serta menjamin keamanan perdagangan.

- Pengawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang strategis, obat dan makanan.
- Meningkatkan jumlah dan kompetensi aparatur metrologi legal
- Penambahan cakupan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang diawasi
- Pengelolaan laboratorium metrologi legal

Strategi 3 : Meningkatkan Realisasi Kerjasama Bidang Perdagangan atas MoU yang telah disepakati antar pemerintah Kota Kendari dengan pihak yang bekerjasama.

- Penyepakatan bidang yang dikerjasamakan dan bentuk lembaga kerjasama;
- Pelaksanaan pemasaran dan promosi obyek kerjasama secara bersama-sama;
- Harmonisasi regulasi bersama yang mengatur implementasi program kerjasama di bidang perdagangan;
- Koordinasi dan dukungan dari pemerintah pusat dalam hal instrumen peraturan ekspor-impor, pengawasan dan penegak hukum terhadap praktek perdagangan ilegal dan proteksi untuk produk dalam negeri ; dan
- Pemusatan kegiatan ekonomi di wilayah tertentu untuk menghasilkan keuntungan bersama, memperpendek mata rantai perdagangan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penciptaan efisiensi perdagangan.

Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari. Secara spesifik permasalahan di sektor koperasi dan UKM berkaitan dengan kualitas kelembagaan koperasi dan perkembangan volume usaha,yaitu:

1. Kurangnya Minat warga usia produktif untuk berwirausaha;
2. Akses permodalan masih terbatas;
3. Kurangnya Jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil;

4. Kompetensi dan daya saing koperasi serta pelaku usaha mikro masih rendah;
5. Kurangnya dukungan pembinaan terhadap pengembangan UMKM dan Koperasi serta usaha kreatif;
6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kelompok belum berorientasi pada peningkatan kemasan produk dan pemasaran guna meningkatkan daya saing usaha;
7. Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam berkoperasi.

Masalah yang umum dihadapi di Kota Kendari terkait dengan pelaksanaan urusan Perdagangan meliputi beberapa aspek sebagai berikut :

a. Pengawasan peredaran barang dan jasa

Permasalahan mengenai peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kelangkaan stok dan disparitas harga bahan pokok;
2. Upaya perlindungan konsumen.

b. Perwujudan Kendari sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan nasional

Permasalahan mengenai perwujudan Kendari sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan nasional meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Penyediaan infrastruktur yang mendukung perdagangan secara berkelanjutan;
2. Perluasan jaringan pemasaran;
3. Upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar lokal dan domestik.

c. Peningkatan kebijakan yang dapat menjalin hubungan antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan, industri

Permasalahan mengenai peningkatan kebijakan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan, industri meliputi beberapa aspek sebagai berikut :

1. Sinergitas peraturan pusat dan daerah;
2. Proses perijinan masih belum efisien.

Maka selanjutnya dalam proses kedepan peningkatan di bidang perdagangan, koperasi dan UKM Kota Kendari perlu ditingkatkan untuk mewujudkan upaya integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan terminal) melalui implementasi manajemen logistik kota.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rumusan usulan program dan kegiatan yang dituangkan dalam rancangan awal RKPD adalah suatu tahapan yang digunakan bagi Perangkat Daerah untuk memuat kebutuhan rencana kerja yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya. Tahapan penyusunan rencana kerja ini melalui proses penyandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penjelasan mengenai analisa kebutuhan rencana kerja perangkat daerah tersebut dilakukan bilamana adanya temuan-temuan rencana kerja perangkat daerah yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KOTA KENDARI

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM				7,322,270,637	
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				7,215,270,637	
						PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Cakupan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	90 %	100,000,000	
						Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol	100 %	100,000,000	

					Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					Terwujudnya kestabilan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Konsumen Akhir	100 %	70,000,000	
					PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					Terlaksananya Kegiatan Kemetrologian	75 %	170,000,000	
					Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					UTTP Wajib Tera dan Tera Ulang telah dibubuhkan CAP Tanda SAH/Keterangan Pengesahan dan dalam kondisi tidak rusak	100 %	170,000,000	
					Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				Kota Kendari	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Alat Ukur 800	100,000,000	
					Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				Kota Kendari	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jenis Alat Ukur 80	50,000,000	

					Penyidikan Metrologi Legal	Kota Kendari	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	1 Kali	20,000,000	
					PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri	90 %	1,000,000	
					Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri		Meningkatkan informasi, promosi, keunggulan dan pemakaian produk dalam negeri untuk meningkatkan minat dan atensi masyarakat	100 %	1,000,000	
					Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kota Kendari	Terlaksananya promosi untuk pemakaian produk dalam negeri	3 Pasar	1,000,000	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH		Pesentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5,505,270,637	

					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	10,000,000	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Keuangan	100 %	4,083,967,765	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	-	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	100 %	180,000,000	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah				Terpenuhinya Administrasi Umum	100 %	454,902,872	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Tersediannya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	414,000,000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	117,400,000	

								Persentase penanganan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap Koperasi	90 %	1,000,000	
								Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Koperasi	100 %	1,000,000	
								Presentase pertumbuhan usaha mikro	90 %	33,000,000	
								Jumlah Usaha Mikro yang di fasilitasi usahanya	100 %	33,000,000	

[illegible]

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari Tahun Anggaran 2022, terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan yaitu berupa program Pengembangan UMKM Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah merupakan instrument yang digunakan untuk mencapai rencana kerja pembangunan daerah melalui Visi dan Misi Kepala Daerah. Tujuan dan sasaran ini juga memuat langkah-langkah strategi dan kebijakan yang diturunkan pada program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja yang akan dilaksanakan. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari selaku institusi yang dipercaya sebagai pemegang peran sentral dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari.

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga memperhatikan isu-isu yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta merumuskan permasalahan-permasalahan terkait menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan telaahan rencana strategis dari kementerian atau Lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari.

Dalam menjalankan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2017-2022. Yang mana Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari diberikan tanggung jawab pada misi yang ke 1 (satu) yaitu “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat” misi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari disusun dengan memperhatikan Visi Kepala Daerah, yang ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2017 – 2022.

Secara konseptual, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi akan membantu semua komponen untuk memahami substansi yang terkandung dalam visi. Dengan demikian, rumusan misi yang baik akan memberikan panduan kejelasan arah bertindak semua komponen untuk menentukan arah kebijakan, program hingga kegiatan yang berorientasi pada visi organisasi.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari adalah :

1. Peningkatan arus Perdagangan Nasional dan antar pulau dari dan menuju Kota Kendari
2. Mendorong Pemantapan daya saing UMKM pada sektor Pertanian, barang dan jasa serta Koperasi melalui Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Industri kreatif.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Peningkatan Manajemen Logistik.
2. Meningkatnya jaringan bisnis antara Pemerintah dengan Pemerintah dan Pemerintah dengan Bisnis Jasa dan Perdagangan Komoditi barang dalam skala Nasional dan Antar Pulau yang ditunjang dengan Pusat Pelayanan Informasi yang terintegrasi.
3. Meningkatnya Produktivitas UMKM sektor produksi Barang dan jasa.

3.2. Program dan Kegiatan

Renja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari mendefenisikan seluruh Sasaran Strategis, kebijakan, program, dan kegiatan yang diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari untuk mencapainya dalam satu tahun, dan

merupakan tolak ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode. Adapun rincian rencana kegiatan perprogram serta indikator Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari tahun 2022, terlihat pada tabel Lampiran.

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN KOTA KENDARI

: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

Nama Perangkat Daerah		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2022				Catatan Penting		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
Kode		2		3		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	8		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1						4	5	6	7			9	10
3			DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM					7,322,270,637					8,054,068,693
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					7,215,270,637					7,936,368,693
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				90 %	100,000,000				90 %	110,000,000
3	30	02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Meningkatnya pemahaman tentang retribusi izin tempat penjualan Minol dan terkendalinya peredaran minol		100 %	100,000,000				100 %	110,000,000
3	30	02	01		Meningkatnya pemahaman tentang retribusi izin tempat penjualan Minol dan terkendalinya peredaran minol	Kota Kendari	69 Usaha	100,000,000	PAD			69 Usaha	110,000,000
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Tingkat perlindungan konsumen		90 %	1,339,000,000				91 %	1,472,900,000

3	30	03	201	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan pasar		100 %	1,339,000,000			100 %	1,472,900,000
3	30	03	201 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya rehab pasar	Kota Kendari	3 Pasar	135,000,000	PAD		3 Pasar	148,500,000
3	30	03	201 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya operasi pasar	Kota Kendari	12 Bulan	1,204,000,000	PAD		12 Bulan	1,324,400,000
3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		90 %	100,000,000			90 %	110,000,000
3	30	04	201	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa untuk meningkatkan tertib usaha peredaran barang dan jasa		100 %	30,000,000			100 %	33,000,000
3	30	04	201 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Terlaksananya pengawasan barang pokok dan barang penting	Kota Kendari	164 Agen dan Pasar	30,000,000	PAD		164 Agen dan Pasar	33,000,000
3	30	04	202	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terkendalinya inflasi dan tersedianya barang kebutuhan pokok dan barang penting		100 %	70,000,000			100 %	77,000,000
3	30	04	202 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar	Kota Kendari	14 Pasar	30,000,000	PAD		14 Pasar	33,000,000
3	30	04	202 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/kota	Terlaksananya pasar murah dan tersedianya kebutuhan sembako murah	Kota Kendari	1 Kali	40,000,000	PAD		1 Kali	44,000,000

3	30	06			PROGRAM STANDARISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya pengawasan terhadap penggunaan alat UTTP	90 %	170,000,000			90 %	187,000,000
3	30	06	201		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya kesadaran pemahaman masyarakat tentang perlindungan hak-hak konsumen, pengujian/penilaian terhadap alat ukur untuk dibandingkan dengan standarisasi sesuai dengan satuan ukur yang berlaku dan dilakukan oleh tenaga ahli	100 %	170,000,000			100 %	187,000,000
3	30	06	01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Terlaksananya kegiatan Tera Tera Ulang	Alat Ukur 800	100,000,000	APBD		Alat Ukur 800	110,000,000
3	30	06	02		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Terlaksananya pengawasan	Jenis Alat Ukur 80	50,000,000	APBD		Jenis Alat Ukur 80	55,000,000
3	30	06	03		Penyidikan Metrologi Legal	Terlaksananya kegiatan UTTP	Bulan 12	20,000,000	APBD		Bulan 12	22,000,000
3	30				PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri	90 %	1,000,000			90 %	1,100,000
3	30	07	201		Pelaksanaan promosi, pemasaran, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Meningkatkan informasi, promosi, keunggulan dan pemakaian produk dalam negeri untuk meningkatkan minat dan atensi masyarakat	100 %	1,000,000			100 %	1,100,000
3	30	01	201	03	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri	3	1,000,000	APBD		3	1,100,000
3	30				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Pesentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5,505,270,637			100 %	6,055,368,693

3	30	01	201		Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya kegiatan administrasi keuangan		100 %	10,000,000			100 %	11,000,000
3	30	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen RENJA SKPD	Kota Kendari	100 %	5,000,000	APBD		100 %	5,500,000
3	30	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen SAKIP	Kota Kendari	100 %	5,000,000	APBD		100 %	5,500,000
3	30	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Keuangan dan Administrasi Perkantoran		100 %	4,083,967,765			100 %	4,492,364,541
3	30	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji, Tunjangan ASN, TP-PNS, dan Insentif	Kota Kendari	100 %	3,988,367,765	APBD		100 %	4,387,204,541
3	30	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Dokumen SPJ Keuangan	Kota Kendari	100 %	27,000,000	APBD		100 %	29,700,000
3	30	01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan	Kota Kendari	100 %	20,000,000	APBD		100 %	22,000,000
3	30	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Akuntansi 1, Operator 1, Adm 4)	Dokumen Laporan Keuangan	Kota Kendari	100 %	48,600,000	APBD		100 %	53,460,000
3	30	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terciptanya Peningkatan Kapasitas Aparatur		100 %	180,000,000			100 %	198,000,000
3	30	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kualitas SDM ASN	Kota Kendari	100 %	170,000,000	APBD		100 %	187,000,000
3	30	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Diklat Teknis ASN	Kota Kendari	100 %	10,000,000	APBD		100 %	11,000,000

3	30	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Sarana Administrasi Perkantoran		100 %	454,902,872		100 %	499,964,152
3	30	01	206	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya belanja komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Kendari	12 Bulan	6,000,000	APBD	12 Bulan	6,171,000
3	30	01	206	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat-Alat Kebersihan	Kota Kendari	12 Bulan	10,000,000	APBD	12 Bulan	11,000,000
3	30	01	206	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Belanja Kebutuhan ATK	Kota Kendari	12 Bulan	80,000,000	APBD	12 Bulan	88,000,000
3	30	01	206	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Belanja Kebutuhan Cetak dan Penggandaan	Kota Kendari	12 Bulan	50,000,000	APBD	12 Bulan	55,000,000
3	30	01	206	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	Kota Kendari	12 Bulan	1,000,000	APBD	12 Bulan	1,100,000
3	30	01	206	07 Penyediaan Bahan/Material	Sarana Promosi Kegiatan SKPD	Kota Kendari	2 Kali	87,902,872	APBD	2 Kali	96,693,152
3	30	01	206	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Kota Kendari	12 Bulan	20,000,000	APBD	12 Bulan	22,000,000
3	30	01	206	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Rapat-Rapat Koordinasi dan Biaya Perjalanan Dinas Konsultasi Luar dan Dalam Daerah serta Makan Minum Rapat	Kota Kendari	12 Bulan	200,000,000	APBD	12 Bulan	220,000,000
3	30	01	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Sarana Administrasi Perkantoran		100 %	414,000,000		100 %	455,400,000
3	30	01	207	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas	Kota Kendari	2 Unit	250,000,000	PAD	2 Unit	275,000,000
3	30	01	207	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Operasional	Kota Kendari	1 Unit	50,000,000	PAD	1 Unit	55,000,000
3	30	01	207	05 Pengadaan Mebel	Tersedianya Meja dan Kursi Kerja, Kursi Rapat dan Kursi Tunggu	Kota Kendari	1 Paket	24,000,000	PAD	1 Paket	26,400,000
3	30	01	207	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Kota Kendari	1 Paket	45,000,000	PAD	1 Paket	49,500,000

3	30	01	207	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung PLUT	Kota Kendari	1	Paket	25,000,000	PAD		1	Paket	27,500,000
3	30	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Kota Kendari	5	AC	20,000,000	PAD		5	AC	22,000,000
3	30	01	208	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi Sarana Administrasi Perkantoran		100	%	117,400,000			100	%	129,140,000
3	30	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Belanja Kebutuhan Materi	Kota Kendari	12	Bulan	42,400,000	APBD		12	Bulan	46,640,000
3	30	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Belanja (Pembayaran) Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Kota Kendari	12	Bulan	75,000,000	APBD		12	Bulan	82,500,000
3	30	01	209	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi Sarana Administrasi Perkantoran		100	%	245,000,000			100	%	269,500,000
3	30	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Oli, BBM, Suku Cadang, STNK	Kota Kendari	14	Unit	200,000,000	APBD		14	Unit	220,000,000
3	30	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Kota Kendari	2	Unit	20,000,000	APBD		2	Unit	22,000,000
3	30	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Service AC, Komputer, Laptop dan Printer serta Jaringan Website	Kota Kendari	12	Bulan	25,000,000	APBD		12	Bulan	27,500,000
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					107,000,000					117,700,000

2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi & Kelengkapan yang pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian	Kota Kendari	90 %	12,000,000			91 %	13,200,000
2	17	03	201		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terciptanya Koperasi yang Legal dan Sehat		100 %	12,000,000			100 %	13,200,000
2	17	03	01		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Koperasi	Kota Kendari	Koperasi 150	12,000,000	APBD		160 Unit Usaha	13,200,000
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Sertifikat yang diterbitkan dari hasil penilaian kesehatan		90 %	6,000,000			91 %	6,600,000
2	17	04	201		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Jumlah Koperasi yang Sehat		100 %	6,000,000			100 %	6,600,000
2	17	04	01		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi	Kota Kendari	Koperasi 50	6,000,000	APBD		50 Kopera si	6,600,000

2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase penanganan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap Koperasi		90 %	1,000,000		91 %	1,100,000
2	17	06	201		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bantuan Badan Hukum bagi Pelaku Usaha Koperasi		100 %	1,000,000		100 %	1,100,000
2	17	06	201	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bantuan Badan Hukum bagi Pelaku Usaha Koperasi	Kota Kendari	5 Koperasi	1,000,000	APBD	5 Koperasi	1,100,000
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Aktif		90 %	25,000,000		91 %	27,500,000
2	17	05	201		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemahaman Pengurus tentang Koperasi		100 %	25,000,000		100 %	27,500,000
2	17	05	201	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan SDM Koperasi	Kota Kendari	90 Orang	25,000,000	APBD	90 Orang	27,500,000
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Presentase pertumbuhan usaha mikro		90 %	33,000,000		91 %	36,300,000

2	17	07	201		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya Kapasitas dan SDM Pelaku UKM	Kota Kendari	1	Tahun	100	%	33,000,000			100	%	36,300,000
2	17	07	201	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terlaksananya Pelatihan	Kota Kendari	1	Tahun	100		1,000,000	APBD		100	Unit Usaha	1,100,000
2	17	07	201	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terlaksananya Fasilitasi	Kota Kendari	100	UKM	100		11,000,000	APBD		110	Unit Usaha	12,100,000
2	17	07	201	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya Pelatihan	Kota Kendari	80	Orang			10,000,000	APBD		100	Unit Usaha	11,000,000
2	17	07	201	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi	Kota Kendari	30	Orang			11,000,000	APBD		32	Orang	12,100,000
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Presentase usaha mikro Naik Kelas		90	%	90		30,000,000			91	%	33,000,000
2	17	08	201		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya UMKM yang berorientasi Peningkatan Usaha Menjadi UKM		100	%	100		30,000,000			100	%	33,000,000
2	17	08	201	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan UKM	Kota Kendari	12	UMKM	12		30,000,000	APBD		12	UMKM	33,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Disamping itu, Perangkat daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota.

Perangkat daerah dalam mencapai diperkuat dengan penjelasan-penjelasan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. demi mewujudkan rencana kerja pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga melakukan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA KENDARI TAHUN 2022

Kode		Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
				Tahun 2022 (Dalam Ribuan)		Tahun 2023 (Dalam Ribuan)			
				Target	Rp	Target	Rp		
3		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM			7,322,270,637		8,052,968,699		
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN PERDAGANGAN			7,215,270,637		7,936,368,693		
3	30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	90 %	100,000,000	90 %	110,000,000		
3	30 02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap Gudang	100 %	-	100 %	5,500,000		
3	30 02	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	-	Dokumen	-	Dokumen	Dinas Perdagangan & UKM	Kota Kendari
3	30 02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Meningkatnya pemahaman tentang retribusi izin tempat penjualan Minol dan terkendalinya peredaran minol	100 %	100,000,000	100 %	110,000,000		
3	30 02	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Meningkatnya pemahaman tentang retribusi izin tempat penjualan Minol dan terkendalinya peredaran minol	69	Usaha	69	Usaha	Dinas Perdagangan & UKM	Kota Kendari
3	30 02	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terkendalinya Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	100 %	15,000,000	100 %	16,500,000		
3	30 02	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	4	Laporan	4	Laporan	Dinas Perdagangan & UKM	Kota Kendari
3	30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat perlindungan konsumen	90 %	1,339,000,000	91 %	1,472,900,000		

Kode		Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah	Lokasi		
				Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Tahun 2022 (Dalam Ribuan)				Tahun 2023 (Dalam Ribuan)	
						Target	Rp			Target	Rp
3	30	03	201	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan pasar	100 %	1,339,000,000	100 %	1,472,900,000		
3	30	03	201	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya rehab pasar	3 Pasar	135,000,000	3 Pasar	148,500,000	Kota Kendari
3	30	03	201	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya operasi pasar	12 Bulan	1,204,000,000	12 Bulan	1,324,400,000	Kota Kendari
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	90 %	100,000,000	90 %	110,000,000	
3	30	04	201		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa untuk meningkatkan tertib usaha peredaran barang dan jasa	100 %	30,000,000	100 %	33,000,000	
3	30	04	201		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	8 Laporan	43,200,000	8 Laporan	47,520,000	Kota Kendari
3	30	04	201		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Terlaksananya pengawasan barang pokok dan barang penting	164 Agen dan Pasar	30,000,000	164 Agen dan Pasar	33,000,000	Kota Kendari
3	30	04	202		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terkendalinya inflasi dan tersedianya barang kebutuhan pokok dan barang penting	100 %	70,000,000	100 %	77,000,000	

Kode			Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah	Lokasi	
					Tahun 2022 (Dalam Ribuan)		Tahun 2023 (Dalam Ribuan)				
					Target	Rp	Target	Rp			
3	30	04	202	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	14 Pasar	30,000,000	14 Pasar	33,000,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
3	30	04	202	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/kota	1 Kali	40,000,000	1 Kali	44,000,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	90 %	170,000,000	90 %	187,000,000		
3	30	06	201		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100 %	170,000,000	100 %	187,000,000		
3	30	06	201	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	800 Alat Ukur	100,000,000	800 Alat Ukur	110,000,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
3	30	06	201	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	80 Jenis Alat Ukur	50,000,000	80 Jenis Alat Ukur	55,000,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
3	30	06	201	03	Penyidikan Metrologi Legal	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	22,000,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
3	30				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	90 %	1,000,000	90 %	1,100,000		

Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2022 (Dalam Ribuan)		Tahun 2023 (Dalam Ribuan)			
						Target	Rp	Target	Rp		
3	30	07	201	Pelaksanaan promosi, pemasaran, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Meningkatkan informasi, promosi, keunggulan dan pemakaian produk dalam negeri untuk meningkatkan minat dan atensi masyarakat	100 %	1,000,000	100 %	1,100,000		
3	30	01	201	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri	3	Pasar	3	Pasar	Dinas Perdagangan & UKM	Kota Kendari
3	30			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Pesentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5,505,270,637	100 %	6,055,368,693		
3	30	01	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya kegiatan administrasi keuangan	100 %	10,000,000	100 %	11,000,000		
3	30	01	201	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen RENJA SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	Dinas Perdagangan & UKM	Kota Kendari
3	30	01	201	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	Dinas Perdagangan & UKM	Kota Kendari
3	30	01	201	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	Dinas Perdagangan & UKM	Kota Kendari
3	30	01	201	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	Dinas Perdagangan & UKM	Kota Kendari
3	30	01	201	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	Dinas Perdagangan & UKM	Kota Kendari

Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah	Lokasi	
						Tahun 2022 (Dalam Ribuan)		Tahun 2023 (Dalam Ribuan)				
						Target	Rp	Target	Rp			
3	30	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen SAKIP	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,500,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
3	30	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Keuangan dan Administrasi Perkantoran	100 %	4,083,967,765	100 %	4,492,364,541		
3	30	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji, Tunjangan ASN, TP-PNS, dan Insentif	14 Bulan	3,988,367,765	14 Bulan	4,387,204,541	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
3	30	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Dokumen SPJ Keuangan	12 Bulan	27,000,000	12 Bulan	29,700,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
3	30	01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	22,000,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
3	30	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Akuntansi 1, Operator 1, Adm 4)	Dokumen Laporan Keuangan	4 Laporan	48,600,000	4 Laporan	53,460,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
3	30	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	10,000,000	100 %	11,000,000		
3	30	01	203	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,500,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
3	30	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,500,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
3	30	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terciptanya Peningkatan Kapasitas Aparatur	100 %	180,000,000	100 %	198,000,000		
3	30	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	120,000,000	4 Paket	132,000,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari

Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah	Lokasi	
						Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2022 (Dalam Ribuan)		Tahun 2023 (Dalam Ribuan)			
							Target	Rp	Target	Rp		
3	30	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kualitas SDM ASN	5 Orang	170,000,000	5 Orang	187,000,000	Dinas Perdagangan & UKM	Kota Kendari
3	30	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Diklat Teknis ASN	1 Orang	10,000,000	1 Orang	11,000,000	Dinas Perdagangan & UKM	Kota Kendari
3	30	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Sarana Administrasi Perkantoran	100 %	454,902,872	100 %	499,964,152		
3	30	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya belanja komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	6,000,000	12 Bulan	6,171,000	Dinas Perdagangan & UKM	Kota Kendari
3	30	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	Dinas Perdagangan & UKM	Kota Kendari
3	30	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat-Alat Kebersihan	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	11,000,000	Dinas Perdagangan & UKM	Kota Kendari
3	30	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Belanja Kebutuhan ATK	12 Bulan	80,000,000	12 Bulan	88,000,000	Dinas Perdagangan & UKM	Kota Kendari
3	30	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Belanja Kebutuhan Cetak dan Penggadaan	12 Bulan	50,000,000	12 Bulan	55,000,000	Dinas Perdagangan & UKM	Kota Kendari
3	30	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	12 Bulan	1,000,000	12 Bulan	1,100,000	Dinas Perdagangan & UKM	Kota Kendari
3	30	01	206	07	Penyediaan Bahan/Material	Sarana Promosi Kegiatan SKPD	2 Kali	87,902,872	2 Kali	96,693,152	Dinas Perdagangan & UKM	Kota Kendari
3	30	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	22,000,000	Dinas Perdagangan & UKM	Kota Kendari

Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2022 (Dalam Ribuan)		Tahun 2023 (Dalam Ribuan)			
						Target	Rp	Target	Rp		
3	30	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Rapat-Rapat Koordinasi dan Biaya Perjalanan Dinas Konsultasi Luar dan Dalam Daerah serta Makan Minum Rapat	12 Bulan	200,000,000	12 Bulan	220,000,000	Dinas Perdagkop & UKM Kota Kendari
3	30	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana Administrasi Perkantoran	100 %	414,000,000	100 %	455,400,000	
3	30	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas	2 Unit	250,000,000	2 Unit	275,000,000	Dinas Perdagkop & UKM Kota Kendari
3	30	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Operasional	1 Unit	50,000,000	1 Unit	55,000,000	Dinas Perdagkop & UKM Kota Kendari
3	30	01	207	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Meja dan Kursi Kerja, Kursi Rapat dan Kursi Tunggu	1 Paket	24,000,000	1 Paket	26,400,000	Dinas Perdagkop & UKM Kota Kendari
3	30	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	45,000,000	1 Paket	49,500,000	Dinas Perdagkop & UKM Kota Kendari
3	30	01	207	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Aplikasi)	1 Unit	150,000,000	1 Unit	153,000,000	Dinas Perdagkop & UKM Kota Kendari
3	30	01	207	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung PLUT	1 Paket	25,000,000	1 Paket	27,500,000	Dinas Perdagkop & UKM Kota Kendari
3	30	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	5 AC	20,000,000	5 AC	22,000,000	Dinas Perdagkop & UKM Kota Kendari
3	30	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	400,000,000	1 Unit	408,000,000	Dinas Perdagkop & UKM Kota Kendari
3	30	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Sarana Administrasi Perkantoran	100 %	117,400,000	100 %	129,140,000	

Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah	Lokasi	
					Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2022 (Dalam Ribuan)		Tahun 2023 (Dalam Ribuan)				
						Target	Rp	Target	Rp			
3	30	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Belanja Kebutuhan Materi	12 Bulan	42,400,000	12 Bulan	46,640,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
3	30	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Belanja (Pembayaran) Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	12 Bulan	75,000,000	12 Bulan	82,500,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
3	30	01	209	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Sarana Administrasi Perkantoran	100 %	245,000,000	100 %	269,500,000		
3	30	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Oli, BBM, Suku Cadang, STNK	14 Unit	200,000,000	14 Unit	220,000,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
3	30	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	2 Unit	20,000,000	2 Unit	22,000,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
3	30	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	25,000,000	30 Unit	25,000,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
3	30	01	209	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
3	30	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
3	30	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Service AC, Komputer, Laptop dan Printer serta Jaringan Website	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	27,500,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
3	30	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200,000,000	1 Unit	204,000,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari

Kode		Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah	Lokasi
				Tahun 2022 (Dalam Ribuan)		Tahun 2023 (Dalam Ribuan)			
				Target	Rp	Target	Rp		
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			107,000,000		116,600,006		
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						
			Persentase Koperasi & Kelembagaan yang pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian	90 %	12,000,000	91 %	13,200,000		
2	17	03	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	12,000,000	100 %	13,200,000		
2	17	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Koperasi	12,000,000	160 Unit Usaha	13,200,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
2	17	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Unit Usaha	150,000,000	100 Unit Usaha	165,000,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						
			Persentase Sertifikat yang diterbitkan dari hasil penilaian kesehatan	90 %	6,000,000	91 %	6,600,000		
2	17	04	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %	6,000,000	100 %	6,600,000		
2	17	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Koperasi	6,000,000	50 Koperasi	6,600,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						
			Persentase penanganan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap Koperasi	90 %	1,000,000	91 %	6		

Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2022 (Dalam Ribuan)		Tahun 2023 (Dalam Ribuan)			
						Target	Rp	Target	Rp		
2	17	06	201	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bantuan Badan Hukum bagi Pelaku Usaha Koperasi	100 %	1,000,000	100 %	6		
2	17	06	201	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bantuan Badan Hukum bagi Pelaku Usaha Koperasi	5 Koperasi	1,000,000	5 Koperasi	6	Dinas Perdagangan & UKM	Kota Kendari
2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Aktif	90 %	25,000,000	91 %	27,500,000		
2	17	05	201	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemahaman Pengurus tentang Koperasi	100 %	25,000,000	100 %	27,500,000		
2	17	05	201	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan SDM Koperasi	90 Orang	25,000,000	90 Orang	27,500,000	Dinas Perdagangan & UKM	Kota Kendari
2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Presentase pertumbuhan usaha mikro	90 %	33,000,000	91 %	36,300,000		
2	17	07	201	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya Kapasitas dan SDM Pelaku UKM	100 %	33,000,000	100 %	36,300,000		

Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah	Lokasi		
						Tahun 2022 (Dalam Ribuan)		Tahun 2023 (Dalam Ribuan)					
						Target	Rp	Target	Rp				
2	17	07	201	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	300	Unit Usaha	120,960,000	300	Unit Usaha	133,056,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
	17	07	201	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terlaksananya Pelatihan	1	Tahun	1,000,000	100	Unit Usaha	1,100,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
	17	07	201	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terlaksananya Fasilitasi	100	UKM	11,000,000	110	Unit Usaha	12,100,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
	17	07	201	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya Pelatihan	80	Orang	10,000,000	100	Unit Usaha	11,000,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
2	17	07	201	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi	30	Orang	11,000,000	32	Orang	12,100,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
2	17	07	201	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1000	Orang	2,499,557,000	1000	Orang	2,749,512,800	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari
2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Presentase usaha mikro Naik Kelas	90	%	30,000,000	91	%	33,000,000		
2	17	08	201	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya UMKM yang berorientasi Peningkatan Usaha Menjadi UKM	100	%	30,000,000	100	%	33,000,000		

Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Dinas	Lokasi			
						Tahun 2022 (Dalam Ribuan)		Tahun 2023 (Dalam Ribuan)						
						Target	Rp	Target	Rp					
						Target	Rp	Target	Rp					
2	17	08	201	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan UKM	12	UMKM	30,000,000	12	UMKM	33,000,000	Dinas Perdagkop & UKM	Kota Kendari

BAB V


PENUTUP

Rancangan akhir Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari Tahun 2022 memuat program kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rancangan akhir Renja disusun berpedoman kepada Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari dan RKPD Kota Kendari. Rancangan akhir Renja menjadi sangat penting artinya untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah. Penyusunan rancangan akhir Renja merupakan salah bentuk pertanggung jawaban atas program kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari menuju aparatur pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel. Disamping itu Renja juga merupakan tolak ukur capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari, baik yang dilakukan secara individu, tim maupun institusi dalam periode 1 (satu) tahun ke depan.

Renja ini sedapat mungkin direspon oleh pihak-pihak pengambil kebijakan dalam hal pendanaan, sehingga nantinya bisa ditingkatkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari.

Kendari, 2021

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kota Kendari



MUHAMAD SAIFUL, ST.,MM
Pemimpin Utama Muda, Gol. IV/a
NIP. 19680708 199703 1 010